



Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat**

JURNAL AMPOEN

Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

Halaman : 1301-1306

**ETIKA PUBLIK DAN KEBIJAKAN STUNTING
EVALUASI KETERLIBATAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI TINGKAT
DESA OETULU KECAMATAN MUSI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**Maria Yunita Bele, Odilia Luruk, Maria Ermelinda Halla, Pricilia M.O Binsasi,
Fenny Taek, Amin Aminggas Makleat, Dominggus Seran, Adnida Missa**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Timor, Kota Kefamenanu, Indonesia**

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.2699>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Yunita Bele, M., Luruk, O. ., Ermelinda Halla, M. ., M.O Binsasi, P. ., Taek, F. ., Aminggas Makleat, A. ., Seran, D. ., & Missa, A. . (2024). ETIKA PUBLIK DAN KEBIJAKAN STUNTING EVALUASI KETERLIBATAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI TINGKAT DESA OETULU KECAMATAN MUSI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (TTU). *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 1301–1306. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.2699>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat dengan Visi “*Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi*” sebagai platform bagi para pengabdi, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (CC-BY-SA) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





Vol. 2, No. 3, Maret 2025

ETIKA PUBLIK DAN KEBIJAKAN STUNTING EVALUASI KETERLIBATAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI TINGKAT DESA OETULU KECAMATAN MUSI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (TTU)

**Maria Yunita Bele¹, Odilia
Luruk², Maria Ermelinda
Halla³, Pricilia M.O Binsasi⁴,
Fenny Taek⁵, Amin
Aminggas Makleat⁶,
Dominggus Seran⁷, Adnida
Missa⁸**

1,2,3,4,5,6,7,8)

**Program Studi Ilmu Administrasi
Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Timor,
Kota Kefamenanu, Indonesia**

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini adalah "*Bagaimana implementasi kebijakan publik dalam menangani stunting dengan memperhatikan etika publik?*" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penanganan stunting serta bagaimana prinsip etika publik berperan dalam proses implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Data dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan stunting sudah dilakukan melalui program-program intervensi seperti pemberian makanan tambahan (PMT), edukasi gizi untuk ibu hamil, dan peningkatan akses kesehatan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti koordinasi lintas sektoral yang lemah, keterbatasan anggaran, serta kurangnya pengawasan dalam distribusi bantuan. Etika publik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, perlu ditingkatkan untuk memastikan kebijakan stunting berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Etika Publik, Kebijakan Publik, Stunting, Implementasi Kebijakan.





*** Email:**

mariayunitabele@gmail.com,
dominggusseran18@gmail.com,
hella6333@gmail.com,
atnidamissa@gmail.com,
odilialuruk8@gmail.com,
minggasmakleat@gmail.com,
fennytaek@gmail.com,
priciliamob10@gmail.com

Riwayat Artikel

Penyerahan : 19/12/2024
Diterima : 20/12/2024
Diterbitkan : 21/12/2024

Abstract

This research aims to analyze stunting management policies and examine the role of public ethics in their implementation. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through literature review, interviews, and observations. The data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that stunting policies are implemented through intervention programs such as supplementary feeding, nutrition education for pregnant women, and improved access to healthcare services. However, these policies face challenges such as weak intersectoral coordination, budget constraints, and insufficient monitoring of aid distribution. Public ethics, including transparency, accountability, and equity, must be strengthened to ensure effective and targeted stunting management policies.

Keywords: Public Ethics, Public Policy, Stunting, Policy Implementation.

PENDAHULUAN

Oetulu adalah sebuah desa di Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur (TTU) Indonesia, merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.152 jiwa. Dengan memiliki jumlah penduduk yang lumayan banyak desa Oetulu tidak terlepas dari berbagai masalah.

Salah satu permasalahan yang ada di desa oetulu yaitu *stunting*. Stunting sendiri merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak pada anak yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam waktu lama, Stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari standar usianya. Kekurangan gizi yang berkepanjangan menyebabkan gangguan anak yang berisiko mengalami kesulitan belajar dan keterbelakangan intelektual.

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan stunting. Biasanya stunting terhitung dari anak – anak yang berusia 2-5 tahun. Maka itu untuk mengatasi masalah perlu adanya evaluasi keterlibatan kebijakan dari pemerintah dan masyarakat yang ada di desa Oetulu. Dengan adanya evaluasi kebijakan dari pemerintah dan masyarakat tersebut dapat memastikan kurangnya permasalahan stunting di desa oetulu.

Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada “evaluasi keterlibatan kebijakan dari pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi masalah stunting yang ada di desa oetulu. Penelitian ini bertujuan untuk melibatkan peran serta keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan stunting di desa oetulu dengan perspektif etika publik. Jadi teori yang di gunakan yaitu Teori Kongnitif Sosial oleh “Albert Bandura” yang dapat mengkaji fenomena- fenomena stunting di desa Oetulu.

Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya stunting di Desa Oetulu?

2. Bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Desa Oetulu dalam perspektif etika publik?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan stunting di Desa Oetulu?
4. Bagaimana kebijakan dari pemerintah mengenai stunting di Desa Oetulu ?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan terjadinya stunting di desa oetulu.
2. Mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan stunting di desa oetulu dalam perspektif etika publik: mengeksplorasi bagaimana kebijakan stunting di terapkan di tingkat pemerintahan dan sejauh mana nilai-nilai etika publik seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, di jaga dalam implementasinya.
3. Menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan stunting di desa oetulu
4. Mendeskripsikan kebijakan dari pemerintah mengenai stunting di desa oetulu.

Landasan Teori

1. Etika Publik
Etika publik adalah seperangkat nilai yang mendasari tindakan penyelenggaraan negara dalam memberikan pelayanan publik secara transparan, akuntabel, dan adil.
2. Kebijakan Publik
Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kebijakan terkait stunting berfokus pada perbaikan akses gizi, kesehatan, dan edukasi masyarakat.
3. Stunting
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Faktor penyebab meliputi ekonomi, akses pelayanan kesehatan, serta perilaku masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan metode adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Stunting di Desa Oetulu

a. Malnutrisi

Malnutrisi menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting di Desa Oetulu. Asupan gizi yang tidak memadai selama masa kehamilan dan periode tumbuh kembang anak sangat mempengaruhi kondisi kesehatan mereka. Ketika ibu hamil kurang mengonsumsi makanan bergizi, hal ini berdampak langsung pada kondisi kesehatan anak, yang dapat menghambat pertumbuhannya di masa depan.

b. Faktor Sosial Ekonomi

1) Pekerjaan dan Sumber Penghasilan
Mayoritas penduduk Desa Oetulu bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama, dengan kegiatan seperti bertani, berkebun, atau berternak. Ketergantungan pada sektor ini menjadikan pendapatan tidak stabil, tergantung pada kondisi cuaca dan hasil panen yang bisa berfluktuasi. Ketidakpastian pendapatan ini memengaruhi daya beli masyarakat untuk memperoleh makanan bergizi dan layanan kesehatan yang diperlukan.

2) Kurangnya Partisipasi dalam Pembangunan

Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan desa menjadi hambatan. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya kontribusi dalam pembangunan desa mengakibatkan keputusan lebih banyak ditentukan oleh pihak luar, terutama pemerintah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti jalan yang rusak menghambat mobilitas dan akses ke

layanan dasar, yang turut menghambat peningkatan kualitas hidup di desa.

2) Program Pelatihan dan Sosialisasi

Program pelatihan untuk perangkat desa dan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menjadi penting. Melalui pelatihan, perangkat desa dapat memperoleh pengetahuan tentang perencanaan pembangunan dan pengelolaan dana desa. Sosialisasi bertujuan untuk mengajak masyarakat lebih aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan, guna mencapai kemandirian desa yang lebih baik.

2. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Desa Oetulu dalam Perspektif Etika Masyarakat

Implementasi kebijakan penanggulangan stunting harus sensitif terhadap norma budaya lokal dan melibatkan masyarakat secara aktif. Hal ini penting untuk menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program. Kebijakan penanggulangan stunting di Desa Oetulu perlu mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan:

1. Transparansi

Pemerintah Desa Oetulu perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kebijakan dan program penanggulangan stunting, termasuk alokasi anggaran dan rencana pelaksanaan program.

2. Akuntabilitas

Pemimpin desa harus bertanggung jawab atas penggunaan dana dan keberhasilan program dengan melaporkan hasilnya kepada masyarakat secara berkala.

3. Keadilan

Program harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama kelompok

rentan, mendapatkan manfaat tanpa diskriminasi.

4. Keberlanjutan

Program ini harus dijalankan dengan cara yang dapat terus berlanjut, termasuk integrasi dalam perencanaan pembangunan jangka panjang yang mencakup penyediaan fasilitas kesehatan dan pelatihan kader posyandu.

5. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan untuk memastikan keberhasilan program dan meningkatkan rasa tanggung jawab.

6. Penguatan Kapasitas Aparatur Desa

Pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada perangkat desa dan tenaga kesehatan lokal untuk memastikan implementasi yang sesuai dengan etika publik.

3. Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Keterlibatan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanggulangan Stunting di Desa Oetulu

1. Edukasi dan Penyuluhan Masyarakat

- Kampanye kesadaran yang melibatkan Puskesmas, LSM, dan kelompok masyarakat untuk memberikan informasi tentang bahaya stunting dan pentingnya pola makan sehat.
- Pelatihan untuk kader posyandu dalam memberikan informasi gizi yang seimbang kepada ibu-ibu.

2. Penguatan Infrastruktur Kesehatan

Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan pemantauan gizi anak melalui Posyandu yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut.

3. Peningkatan Akses dan Edukasi Gizi Seimbang

- Mengadakan pelatihan untuk keluarga tentang pemanfaatan bahan makanan lokal yang bergizi.

- Promosi ASI eksklusif dan nutrisi ibu hamil untuk mendukung perkembangan anak yang optimal.

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

- Pemberian bantuan untuk pengembangan pertanian lokal guna menyediakan bahan makanan bergizi.
- Pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran untuk keluarga kurang mampu.

5. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dan Organisasi Masyarakat

Mengintegrasikan pendidikan tentang gizi dalam kurikulum sekolah dan mendorong masyarakat untuk membentuk kelompok atau organisasi yang berfokus pada kesehatan dan gizi.

6. Pengawasan dan Monitoring

- Pemantauan perkembangan anak secara berkala untuk memberikan intervensi gizi apabila diperlukan.
- Evaluasi program secara rutin untuk menyesuaikan strategi berdasarkan hasil yang diperoleh.

4. Kebijakan Pemerintah Mengenai Stunting di Desa Oetulu

Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021, telah mengimplementasikan kebijakan untuk menurunkan angka stunting di seluruh Indonesia, termasuk di Desa Oetulu. Kolaborasi antara pemerintah desa dan sektor kesehatan, seperti Puskesmas Oeolo, memainkan peran penting dalam penanggulangan stunting, melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Berdasarkan data terakhir, angka stunting di desa ini telah berhasil diturunkan dari 27 anak yang teridentifikasi stunting, meskipun masih terdapat 7 anak yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah desa dan sektor kesehatan, diharapkan angka stunting dapat terus menurun.

KESIMPULAN

Stunting di Desa Oetulu disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan ketidakstabilan pendapatan keluarga. Kader posyandu memiliki peran vital dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang. Meskipun kebijakan pemerintah sudah ada, implementasi masih membutuhkan perbaikan, terutama dalam hal anggaran dan fasilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Smith, J. A. (2020). *Dampak nutrisi terhadap perkembangan anak*. New York, NY: Oxford University Press.
- Penulis, A. A., Penulis, B. B., & Penulis, C. C. (Tahun). Judul artikel. *Nama Jurnal*, Volume(Nomor), halaman.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Indonesia.
- Bandura, Albert. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara. (2023). *Data Statistik Desa Oetulu, Kecamatan Musi*. Kefamenanu: BPS Timor Tengah Utara.